BAB II

DATA HASIL PENELITIAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Sejak masa pejajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah daearah otonom (Gemente) maupun swasta atau patungan antara pemerintah dan swasta.

DI daerah Jawa Barat (khususnya kota Bandung), perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum pada masa penjajahan Belanda, dikenal dengan nama Bandoengsche Electricitiet Maatschappij (BEM) yang didirikan pada tahun 1905. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1920 beridirilah Perusahaan Perseroan Gemeenschappelijk Electricitiet Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan akta pendirian notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen no. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), perindustrian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sa dengan wilayah kerja seluruh pulau Jawa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan hingga Saat Ini

Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjalani periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan

kedaulaan RI dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1957, merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan perlistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia, sebab pada tahun tersebut diadakannya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1957, GEBEO yang berada di Bandung diambil alih oleh pemeintah Republik Indonesia yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah no. 86 tahun 1958 jo, Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi jo, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 19 tahun tentang Perusahaan Listrik Negara.

Kemudian pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Selanjutnya istilah PLN Bandung diubah menjadi PLN Eksploitasi XI, yang berperan sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat, kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN diubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri PUTL no. 013/PRT/1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Dan berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI no. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Eksploitasi XI diubah namanya

menjadi Perusahaan Umum Listrik Distribusi Jawa Barat. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perseroan (Persero), maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan akta pendirian.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- PT. PLN (Persero) Cabang Bandung.
- PT. PLN (Persero) Cabang Cirebon.
- PT. PLN (Persero) Cabang Tasik Malaya.
- PT. PLN (Persero) Cabang Garut.
- PT. PLN (Persero) Cabang Cianjur.
- PT. PLN (Persero) Cabang Sukabumi.
- PT. PLN (Persero) Cabang Bogor.
- PT. PLN (Persero) Cabang Banten.
- PT. PLN (Persero) Cabang Purwakarta.
- PT. PLN (Persero) Cabang Cimahi.
- PT. PLN (Persero) Cabang Majalaya.
- PT. PLN (Persero) Cabang Bekasi.
- PT. PLN (Persero) Cabang Depok.
- PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang.
- PT. PLN (Persero) Cabang Karawang.

2.2 Aktivitas Perusahaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 tahun 1990 tanggal 28 mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2): sifat usaha PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan PLN.

Maksud didirikannya PLN adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan kesehjateraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penydiaanlistrik untuk melayani kegiatan masyarakat.
3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
4. Penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat.

Sedangkan lapangan usaha PLN sendiri ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1990 tanggal 28 mei 1990 pasal 6 a yat (1), (2) dan (3).

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, PLN menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik pemakaian.

Dalam menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PLN melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan listrik dfan

pengembangan penyediaan tenaga listrik. Melalui persetujuan mentri, PLN dapat diberi tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.

2.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Pusat no. 153.K/023DIR/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menggunakan struktur organisasi garis, di mana dalam menjalankan tugasnya pimpinan langsung membawahi lima Deputi Pemimpin pada tiap bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, susunan organisasi dan tata kerja terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan adalah Pemimpin Distribusi.

B. Unsur Pembantu Pimpinan adalah :

   1. Bidang Perencanaan.
   2. Bidang Konstruksi.
   3. Bidang Pengusahaan.
   4. Bidang Keuangan.
   5. Bidang Kepegawaian dan Administrasi.

C. Unsur Pelaksana adalah :

   1. Cabang.
   2. Unit Pengatur Distribusi.

3. Bengkel Distribusi.

D. Unsur Pengawasan adalah Kontrol Intern.

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Unsur dalam Susunan Organisasi Distribusi

Pemimpin

Fungsi, tugas dan wewenang adalah :

1. Memimpin, mengurus dan mengelola distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari distribusi.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan distribusi.
3. Mewakili distribusi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus distribusi yang telah digariskan oleh direksi.
5. Menetapkan kebijaksanaan distribusi sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh direksi.
6. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan distribusi lengkap dengan anggaran keuangan.
7. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan.
8. Menetapkan gaji, pensiunan/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.

9. Menetapkan kebijaksanaan distribusi di bidang perencanaan, pembangunan sarana perindustrian tenaga listrik, pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan sumber daya manusia.
10. Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan distribusi berdasarkan kebijaksanaan direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mengendalikan pelaksanaan tugas para deputi pemimpin dan kepala kontrol intern.
12. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik.

Deputi Pemimpin

Wewenang dan tanggungjawabnya adalah :

1. memimpin dan melaksanakan seluruh kegiatan tata laksana bidang yang dipimpinnya.
2. Bertindak atas nama pimpinan dalam bidangnya masing-masing.
3. Memberikan bahan-bahan pertimbangan dan saran-saran dalam menetapkan kebijakan atau keputusan pemimpin.
4. Menangani masalah-masalha yang bersifat strategis, seperti perencanaan korporat, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik, pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik, pelayanan pelanggan, keuangan dan sumber daya manusia.

Bidang Perencanaan

Tugas pokok bidang perencanaan adalah merumuskan rencana korporat distribusi, pengembangan sistem pendistribusian tenaga listrik, kebutuhan investasi, penyajian data dan informasi serta melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja distribusi.

Bidang Perencanaan terdiri dari :

1. Perencanaan Perusahaan.

   Tugas pokok perencanaan perusahaan adalah menyusun dan menyiapkan rencana korporat distribusi dan pengevaluasian kinerja distribusi.

2. Perencanaan Sistem.

   Tugas pokoknya melaksanakan penyusunan perencanaan pengembangan sistem pendistribusian tenaga listrik serta kebutuhan biaya investasinya.

3. Bagian Sistem Informasi.

   Tugas pokoknya adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi manajemen distribusi dan menyelenggarakan pengolahan data elektronika.

   Bagian sistem informasi terdiri dari :

   a. Jabatan Fungsional Ahli, yang formasi jabatan, uraian jabatan dan formasi tenaga kejanya diusulkan oleh pimpinan dan ditetapkan dengan keputusan direksi.
   b. Seksi Operator Komputer.
   c. Seksi Penunjang Operasi Komputer.

Bidang Perencanaan dipimpin oleh deputi pemimpin bidang perencanaan. Masing-masing bagian dan seksi di bidang perencanaan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan kepala seksi.

Bidang Konstruksi

Tugas pokoknya adalah mengelola pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

Bidang konstruksi terdiri dari :

1. Bagian Perencanaan Konstruksi Distribusi.

   Tugas pokoknya adalah melaksanakan perekayasaan enjiniring dan menyusun rencana pengelolaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

2. Bagian Administrasi Proyek Distribusi.

   Tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan pengorganisasian kerja, penyusunan anggaran, pelaporan penggunaan dana dan pemantauan kemajuan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.

3. Bagian Pengendalian Konstruksi Distribusi.

   Tugas pokoknya adalah melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

4. Bagian Perbekalan Konstruksi Distribusi.

   Tugas pokoknya adalah mengendalikan dan membina pengadaan barang konstruksi untuk pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

Bidang konstruksi dipimpin oleh deputi pemimpin bidang konstruksi. Masing-masing bagian dan seksi di bidang konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bagian dan kepala seksi.

Bidang Keuangan

Tugas pokoknya yaitu menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keuangan dan akuntansi pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana distribusi tenaga listrik serta menyusun laporan keuangannya.

Bidang Keuangan terdiri dari :

1. Bagian Anggaran.

   Tugas pokoknya adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja pengusahaan, serta kebutuhan dana pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik. Pekerjaan –pekerjaan yang ada dibagian anggaran yaitu:

   a) Proses penyusunan Rencana Anggaran Operasi (RAO) tahunan

      - Biaya-biaya rutin diperkirakan berdasarkan ketentuan /plapon yang diterima dari kantor distribusi dan dengan perkiraan dari realisasi yangdikeluarkan pada tahun sebelumnya.
      - Biaya-biaya yang tidak rutin atau yang sifatnya memperluas operasi yang diperkirakan berdasarkan biaya-biaya tahun sebelumnya ditambah dengan kemungkinan kejadian yang akan terjadi pada tahun berikutnya.
      - Biaya-biaya itu dicatat dalam formulir RAO dikirim kekantor distribusi sebagai laporan.

b) Proses perencanaan pengeluaran anggaran operasi(AO) dan ketetapan angggaran tunai(AI)

- Semua rencana

2. Bagian Keuangan.

Tugas pokoknya adalah mengendalikan dan membina keuangan, pembelanjaan pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik, serta melaksanakan tata usaha keuangannya.

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian Keuangan.

b. Seksi Tata Usaha Keuangan Pengusahaan.

c. Seksi Tata Usaha Keuangan Konstruksi.

3. Bagian Akuntansi.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan akuntansi umum dan pengusahaan serta akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta melakukan pencatatan mengenai pembukuan keuangan dan laporannya .

Bagian Akuntansi terdiri dari :

a. Seksi Akntansi Pengusahaan.

b. Seksi Akuntansi Konstruksi.

4. Bagian Tata Usaha Langganan.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan dan membina sistem tata usaha langganan penjualan tenaga listrik serta tarif dan hasil usaha.

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang deputi pemimpin bidang keuangan. Masing-masing bagian dan seksi di bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan kepala seksi.

Bidang Kepegawaian dan Administrasi

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat. Bidang Kepegawaian dan Administrasi terdiri dari :

1. Bagian Perencanaan Pegawai dan Fasilitas.

   Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengevaluasi dan mengembangkan organisasi dan sumber daya manusia, serta kebutuhan fasilitas perkantoran dan peralatan serta sarana kerja.

2. Bagian Kepegawaian.

   Tugas pokoknya adalah melaksanakan tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian serta membina pelaksanaan pengamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

   Bagian Kepegawaian terdiri dari :

   a. Seksi Tata Usaha Kepegawaian.
   b. Seksi Kesejahteraan Pegawai.
   c. Seksi Keamanan dan keselamatan kerja.

3. Bagian Sekretariat dan Umum.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan rumah tangga distribusi, pengadaan sarana kerja, penyediaan angkutan dan kendaraan serta pemeliharaannya.

Bagian Sekretariat Umum terdiri dari :

a. Seksi Sekretariat.

b. Seksi Tata Usaha Pengadaan.

c. Seksi Angkutan dan Kendaraan.

4. Bagian Hukum dan Humas.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan dan menyiapkan produk hukum dan peraturan perundang-undangan, verifikasi pokok-pokok hukum dan peraturan perundang-undangan bantuan hukum serta kegiatan hubungan Masyarakat.

Bidang Administrasi dipimpin oleh deputi pemimpin bidang administrsi. Masing-masing bagian dan seksi di bidang Administrasi dipimpin oleh seorang kepala bagian dan kepala seksi.

Kontrol Intern

Tugas pokoknya adalah membantu pemimpin dalam mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas sisten pengendalian manajemen distribusi dan pelaksanaannya serta memberikan laporan dan saran perbaikannya.

Kontrol Intern terdiri dari :

1. Pemeriksa Teknik.

Wewenang dan tanggungjawabnya adalah :

a. Melaksanakan tugas-tugas operasional pemeriksaan dan penilaian segi teknik pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik di wilayah kerjanya.
b. Melaksanakan tugas-tugas operasional pemeriksaan dan penilaian segi teknik pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik di wilayah kerjanya.
c. Memberikan laporan dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemimpin.

2. Pemeriksa Administrasi Keuangan.

Wewenang dan tanggungjawabnya adalah :

a. melaksanakan tugas-tugas operasional pemeriksaan dan penilaian dalam bidang organisasi dan kepegawaian di wilayah kerjanya.
b. Melaksanakan tugas-tugas operasional pemeriksaan dan penilaian dalam bidang tata laksana dan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
c. Melaksanakan tugas-tugas operasional pemeriksaan dan penilaian segi teknik dalam sarana sarana kerja di wilayah kerjanya.

Cabang

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan tugas operatif yang menyangkut pendistribusian dan penjualan tenaga listrik serta pelayanan pelanggan yang berada di tiap-tiap cabang , biasanya cabang tersebut berada di daerah.

Cabang dipimpin oleh kepala cabang yang bertanggungjawab kepada pemimpin. Wilayah kerja dan susunan organisasi cabang ditetapkan dengan keputusan direksi. Pembentukan cabang diusulkan oleh pemimpin dan ditetapkan dengan keputusan direksi. Menurut kebutuhan, cabang dapat didukung dengan ranting dan atau rayon yang pembentukannya diusulkan oleh pemimpin dan ditetapkan dengan keputusan direksi. Dan menurut kebutuhannya, ranting dan atau rayon dapat didukung dengan sub ranting dan atau kantor jaga yang pembentukannya diusulkan oleh pemimpin dan ditetapkan oleh direksi.

Unit Pengatur Distribusi

Tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan tugas operatif yang menyangkut pelaksanaan operasional sarana pendistribusian tenaga listrik.

Unit pengatur distribusi dipimpin oleh kepala unit pengatur distribusi yang bertanggungjawab kepada pemimpin. Wilayah kerja dan susunan organisasi unit pengatur distribusi ditetapkan dengan keputusan direksi.

Keseluruhan uraian di atas merupakan uraian atas struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat seperti terlihat dalam lampiran.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM